

BAB IV

TIDAK TERPENUHINYA KEAMANAN EKONOMI DAN KEAMANAN PRIBADI DI INDIA DAN BANGLADESH

Berbagai faktor telah menyebabkan terjadinya perdagangan manusia. Faktor utama dari kebanyakan penyebab perdagangan manusia adalah sosio-ekonomi yang rendah. India-Bangladesh sepakat untuk menjalin kerja sama dalam mengatasi perdagangan manusia ini. Namun, perdagangan manusia baik India maupun Bangladesh mengalami peningkatan jumlah akibat keamanan manusia yang masih tidak terpenuhi di kedua negara. Keamanan manusia yang dimaksud adalah keamanan ekonomi dan keamanan pribadi.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan faktor-faktor tersebut. Bab ini akan dibagi berdasarkan kondisi keamanan ekonomi dan keamanan pribadi, sehingga dapat teridentifikasi bagaimana tidak terpenuhinya keamanan ekonomi dan keamanan pribadi di masing-masing negara.

A. Kondisi Keamanan Ekonomi India-Bangladesh

Meski ekonomi India mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa masalah terkait ekonomi di sana belum teratasi. India dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang kompleks. Tingkat kemiskinan, pengangguran, arus imigrasi dan berbagai permasalahan lain muncul dari ekonomi India.

Permasalahan yang pertama adalah kemiskinan. Pada tahun 2012, *World Bank* mendapati bahwa 1 dari 5 orang India adalah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di India mencapai 270 juta orang, yang berarti sekitar 21,7 persen dari jumlah total penduduk di India saat itu. Sebanyak 80 persen dari penduduk miskin India tinggal di daerah pedesaan di seluruh negara tersebut.

Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan mencapai 25 persen, sedangkan daerah urban mencapai 14 persen (World Bank, 2016). Penduduk India dinyatakan berada di bawah garis kemiskinan ketika seseorang berpenghasilan di bawah 27.000 rupe per tahunnya (Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, 2016). Di tahun 2014-2015, jumlah penduduk dengan kemiskinan relatif mencapai sekitar 10 juta orang (Oxfam India, 2016).

Kemiskinan terjadi salah satunya akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Angka kelahiran di India mencapai 20,7 persen di tahun 2012 (UNICEF, 2013). Angka ini turun menjadi 19 persen di tahun 2017. Jumlah penduduk yang berlebih tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah pendapatan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, dapat mengurangi jumlah pendapat per kapita di India.

Permasalahan kedua terkait ekonomi yang India dihadapi adalah ketersediaan lapangan kerja terbatas dan pengangguran. Sedikitnya lapangan kerja juga menjadi salah satu penyebab dari permasalahan kemiskinan. Lebih dari 50 persen sektor yang dijalankan di India adalah sektor pertanian. Penduduk sulit untuk mendapatkan pekerjaan diluar sektor tersebut akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan lain, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kemampuan dasar penduduk India. Untuk tingkat pendidikan, UNESCO mencatat di tahun 2013, sebanyak 2.897.747 anak-anak India putus sekolah, sementara jumlah remaja India yang tidak bersekolah sebanyak 11.109.371 orang (UNICEF, 2013).

Di tahun 2012, tingkat *Worker Population Ratio* (WPR) atau rasio populasi pekerja diperkirakan mencapai 50,8 persen di seluruh India, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 52,9 persen. Perempuan berpartisipasi sebanyak 23,6 persen saja dari total jumlah rasio populasi pekerja (Press Information Bureau, Ministry

of Labour & Employment, 2012). Biro Tenaga Kerja India mencatat di tahun 2013, untuk usia 15-29 tahun angka WPR mencapai 34,2 persen. Sedangkan sebanyak 13,3 persen pada rentang umur yang sama adalah pengangguran. Pemerintah India menemukan 1 dari 3 orang yang bergelar sarjana adalah pengangguran. (Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment, 2013).

Dari total seluruh penduduk India, angka pengangguran di tahun 2013-2014 mencapai 3,5 persen dan mengalami penurunan menjadi 3,4 persen pada tahun 2015-2017. Ini berarti sekitar 17,8 juta penduduk India masih belum memiliki pekerjaan di tahun 2017 (ILO, 2017). Partisipasi perempuan yang bekerja menurun di tahun 2015 saat GDP India tengah melambung. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak didukung dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Meskipun pemerintah India telah banyak menumbuhkan lapangan pekerjaan di tahun 2016, namun hal tersebut tidak selaras dengan pertumbuhan penduduk yang ada. Jumlah pertumbuhan ketersediaan pekerjaan diperkirakan menurun di tahun 2018.

Hal serupa terjadi di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh tengah merasakan kestabilan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai pertumbuhan GDP Bangladesh sebesar 7,2 persen di tahun 2016 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 7,1 persen di tahun 2017. Namun, di tahun 2016 World Bank mencatat 1 dari 4 orang Bangladesh hidup dalam kemiskinan, yaitu 24,3 persen dari jumlah total penduduk Bangladesh. Sementara 12,9 persen penduduk Bangladesh lainnya hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, setelah turun dari 17,6 persen di tahun 2010 (World Bank, 2017).

Sementara itu, angka pengangguran di Bangladesh mencapai 4,1 persen di tahun 2016. Hampir 25 persen penduduk Bangladesh yang berusia 15-29 tahun tidak produktif, dimana mereka tidak bersekolah maupun bekerja. Satu per tiga dari jumlah pekerja di Bangladesh

hanya bekerja paruh waktu atau sementara. Jumlah pekerja pada masing-masing sektor, baik pertanian, pelayanan jasa maupun industri hampir sama, yaitu di atas 30 persen di tahun 2013. Jumlah tertinggi pekerja berada di sektor pertanian yaitu sebanyak 34,5 persen (ILO, 2016). Namun pelayanan jasa menyumbang hasil terbanyak dari GDP Bangladesh.

Seperti halnya India, penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah Bangladesh maupun perusahaan swasta tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk Bangladesh. Jumlah di tahun 2014 dan 2015 pemerintah Bangladesh hanya menghasilkan sekitar 600.000 pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja yang terhitung dari April 2015 hingga Juni 2016 mencapai 62,5 juta (Bangladesh Bureau Statistics, Ministry of Planning, 2017).

Akibat kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, penduduk Bangladesh lebih memilih untuk bermigrasi ke luar negeri dengan upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan upah dalam negeri Bangladesh. Pada tahun 2016, sekitar 100.000 perempuan Bangladesh bermigrasi ke luar negeri, khususnya negara Teluk untuk pekerjaan rumah tangga. Laporan mengenai pengiriman tenaga kerja Bangladesh dilampirkan di bagian belakang karya tulis ini.

Peningkatan migrasi ke luar negeri dari Bangladesh tidak disertai dengan keamanan bagi para pekerja. Laporan mengenai penyiksaan, kekurangan makanan dan pelecehan psikis, seksual dan fisik pekerja Bangladesh terus bertambah. Padahal pekerja telah membaya mahal untuk biaya perekrutan migrasi. Upah minimum pekerja rumah tangga dari Bangladesh adalah yang terendah dari semua negara pengirim, meskipun upah ini tinggi dibandingkan di dalam negeri. Namun perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh Kedutaan Bangladesh di sana dirasa tidak memadai (HRW, 2017).

Melihat data yang tercantum di atas, membuktikan keamanan ekonomi penduduk India maupun Bangladesh masih belum mencapai kata tercukupi. Permasalahan kemiskinan, peengangguran, lapangan kerja terbatas menimbulkan keinginan untuk bermigrasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik melalui pekerjaan maupun pernikahan. Namun kebanyakan migrasi membutuhkan biaya perekstrutan yang tinggi awal, menimbulkan masalah lain seperti hutang, bermigrasi secara ilegal, dsb. Perdagangan manusia dilakukan dengan melihat kesempatan terhadap keadaan-keadaan seperti contoh di atas. Masing-masing negara telah melakukan usaha perbaikan sistem ekonomi dan masih terus berjalan hingga saat ini agar sumber masalah dari perdagangan manusia dapat setidaknya dikurangi.

B. Kondisi Keamanan Pribadi India-Bangladesh

Lebih dari 70 persen penduduk India beragama Hindu. Hindu sangat kuat ikatannya dengan budaya dan tradisi yang juga merupakan sejarah bagi India. Salah satu kitab umat Hindu, yang juga memuat tentang orang-orang Arya (salah satu penduduk asli India) adalah Kitab Veda. Di dalam Kitab Veda terdapat Manusmriti, yang berarti hukum Manu atau instituti Manu (Manu adalah leluhur atau nenek moyang manusia menurut kepercayaan umat Hindu). Hukum ini digunakan sebagai pedoman dalam hidup, ini seperti hukum dan peraturan untuk mengatur kehidupan manusia. Jika dalam Islam terdapat syariat, maka seperti itulah Manusmriti tersebut digambarkan dalam ajaran Hindu.

Dalam hukum ini membenarkan adanya kasta-kasta pada manusia sebagai suatu keteraturan dalam kehidupan manusia. Kasta Hindu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah Brahmana, adalah orang-orang yang mengabdikan diri pada agama, penghubung antara manusia dan dewa, para intelektual, mengetahui adat istiadat dan pengetahuan suci. Yang kedua adalah Ksatria,

mereka yang mengatur urusan pemerintahan, memiliki kekuasaan, pejuang, raja, bangsawan. Yang ketiga adalah Waisya, yaitu kelompok pedagang, petani, pengrajin dan pejabat rendah. Dan yang terakhir adalah Sudra, yaitu orang biasa yang mengerjakan pekerjaan kasar atau buruh atau biasa disebut dengan rakyat jelata. Terdapat satu golongan yang bukan bagian dari kasta, yaitu Dalits atau kelompok orang tak tersentuh. Seluruh hukum Kasta ini berlaku dalam kehidupan manusia secara turun temurun di India (Musidi, 2012, hal. 4).

Pada zaman India modern seperti saat ini, kasta dalam masyarakat kota sudah mulai jarang ditemui. Banyaknya arus migrasi dan percampuran budaya membuat orang-orang mulai berpikiran luas, menerima perbedaan dan bersikap lebih adil. Presiden India saat ini, Ram Nath Kovind, merupakan seorang Dalits dan menjadi presiden kedua yang berasal dari kaum Dalits.

Meskipun perbedaan kasta mulai hilang, namun tidak bagi daerah pedesaan. Di desa-desa di India, penduduk masih menggunakan sistem kasta dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya seseorang akan sulit untuk mendapat pekerjaan jika ia berasal dari kasta Dalits, meskipun ia adalah seorang sarjana. Begitu pula pelayanan dan perilaku masyarakat terhadap mereka yang berasal dari kasta bawah. Beberapa perempuan dinikahkan dengan kasta di atasnya untuk mengubah garis keturunan dan hidup lebih layak, tapi suami yang merasa berada dari kasta atas akan memperlakukan istri dengan tidak baik, hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga bahkan istri dieksploitasi dan diperdagangkan demi uang.

Selain itu, budaya patriarki di India masih sangat kental, terutama di daerah pedesaan. Pandangan bahwa perempuan dilahirkan untuk mengabdikan kepada keluarga dan perempuan selalu berada pada tingkatan dibawah laki-laki sudah ditanamkan pada setiap individu. Perempuan dianggap tidak mampu menghasilkan uang, bergantung pada laki-laki dan hanya dapat membantu urusan rumah

tangga. Sehingga kesempatan bekerja untuk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Pemikiran penduduk desa India yang masih belum terbuka terkait pendidikan tinggi dan pekerjaan dalam ruang publik bagi perempuan masih sulit untuk diubah. Adat istiadat yang masih dijunjung tinggi penduduk desa menjadikan perempuan tidak termotivasi dari dalam diri untuk mendapatkan setidaknya kemampuan dasar dalam bekerja.

Beberapa kasus anak hilang juga berakhir diperdagangkan. Kebanyakan anak-anak dari pedesaan India memutuskan untuk lari dari lingkungan yang membuat mereka frustrasi (dengan kemiskinan, orang tua pemabuk, kekerasan dalam rumah tangga, tidak bersekolah dan terpaksa bekerja), setelah sampai ke kota dengan tidak berbekal apapun, baik uang maupun tujuan, mereka berakhir dengan tersesat pada kepadatan aktivitas kota yang membingungkan. Hal ini sangat rentan terhadap penculikan anak yang berujung perdagangan manusia.

Sementara itu, Bangladesh adalah negara dengan partisipasi kerja perempuan tertinggi di Asia Selatan. Dalam perkembangannya, tingkat partisipasi kerja dari perempuan Bangladesh telah mengalami peningkatan. Tahun 2017 Bangladesh berada pada posisi 47 dari 147 negara di dunia dalam partisipasi kerja perempuan menurut *World Economy Forum* (WEF). Namun keadaan ini adalah tampak luar dari peningkatan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi Bangladesh. Realitanya, meskipun jumlah perempuan dalam partisipasi kerja meningkat, kebanyakan perempuan mendapatkan upah setengah dari upah pekerja laki-laki. Mayoritas perempuan bekerja pada pekerjaan dengan kebutuhan keterampilan rendah dan upah yang rendah. Sementara tingkat melek huruf perempuan di Bangladesh masih 54 persen.

Kondisi perempuan di Bangladesh sangat memprihatinkan dimana 18 persen anak perempuan menikah dibawah usia 15 tahun di tahun 2016. Di tahun 2016, sebanyak 52 persen perempuan Bangladesh menikah

dibawah usia 18 tahun dan 18 persen lainnya menikah dibawah usia 15 tahun (Barr, 2016). Beberapa pejabat menerima suap untuk memalsukan akte kelahiran perempuan muda. Pada November 2017, pemerintah Bangladesh menyetujui rancangan undang-undang pernikahan anak usia dibawah 18 tahun dengan “keadaan khusus” seperti hamil diluar nikah misalnya. Tidak ada batasan usia minimal dalam undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan terhadap pernikahan dan tidak terpenuhinya hak-hak anak Bangladesh. Padahal di tahun 2014, Perdana Menteri Hasina menjanjikan untuk mengakhiri pernikahan anak dibawah usia 15 tahun di tahun 2021 mendatang (Barr, 2016).

Orang tua berpikiran bahwa dengan menikahkan anak, hidup mereka akan lebih baik. Anak-anak tidak mendapatkan hak untuk bersekolah dan memilih pilihan hidup mereka, serta mendapat pekerjaan yang lebih baik. Pada usia tersebut tubuh dan mental anak masih berkembang. Kehamilan justru akan membahayakan kehidupan ibu dan calon bayi. Perempuan-perempuan muda ini rentan menjadi korban perdagangan manusia, dimana kemiskinan akan memaksa mereka melakukan migrasi dan menjadi korban eksploitasi.

